

# IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN DI KABUPATEN TABANAN PROVINSI BALI

Oleh

Putu Weda Bramanta Wicaksana

NPP. 30.1066

*Asdaf Kabupaten Badung, Provinsi Bali*

*Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik*

Email: [wedabramanta7799@gmail.com](mailto:wedabramanta7799@gmail.com)

Pembimbing Skripsi: Bertha Lubis, S.Sos, M.Si

## ABSTRACT

**Problem Statement/Background (GAP):** Poverty is a social problem that until now is still very difficult to solve both at the central and regional levels. This causes the need for a strategy in the right and continuous policy-making process so that this problem can be overcome. The decision of the Minister of Social Affairs in an effort to alleviate poverty, the Tabanan Regency Government, especially the Social Service as the implementer of the Non-Cash Food Assistance (BPNT) program policy since 2017 because Tabanan Regency is one of the districts in Bali with a fairly high poverty rate, therefore researchers are interested in researching how the implementation of the Non-Cash Food Assistance Program in alleviating poverty in Tabanan Regency. **Purpose:** Know and describe how the implementation of the Non-Cash Food Assistance Program in Tabanan Regency. **Method:** This research uses a descriptive method with a qualitative approach. The research location was in Tabanan Regency with the technique of selecting informants by purposive sample. Data collection techniques carried out by researchers are interviews, observation and documentation. The study also used Triangulation in analyzing the data. **Result:** Although it is said to be good enough, in reality there are still several obstacles in the implementation of this program such as inadequate facilities, technical problems in the implementation of the program, and government efforts to overcome existing problems are still not optimal. **Conclusion:** Despite the problems, this assistance program has had an impact in reducing the poverty rate in Tabanan Regency.

**Keywords:** Implementation, Non-Cash Food Assistance Program (BPNT), Poverty

---

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Kemiskinan merupakan suatu masalah sosial yang hingga saat ini masih sangat sulit untuk dipecahkan baik itu di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini menyebabkan perlu adanya strategi pada proses pembuatan kebijakan yang tepat serta berkesinambungan agar permasalahan ini mampu diatasi. Keputusan Menteri Sosial dalam upaya mengentaskan kemiskinan, maka Pemerintah Kabupaten Tabanan khususnya Dinas Sosial sebagai

pelaksana kebijakan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sejak 2017 dikarenakan Kabupaten Tabanan merupakan salah satu Kabupaten di Bali dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi, oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti terkait bagaimana Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Tabanan. **Tujuan:** Mengetahui serta mendeskripsikan bagaimana implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kabupaten Tabanan. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian berada di Kabupaten Tabanan dengan teknik pemilihan informan secara Purposive sample. Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini juga menggunakan Triangulasi dalam menganalisis data. **Hasil/Temuan:** Meskipun dikatakan sudah cukup baik, namun kenyataannya masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan program ini seperti sarana yang kurang memadai, masih adanya masalah teknis dalam pelaksanaan program, serta upaya pemerintah untuk mengatasi masalah yang ada masih belum optimal. **Kesimpulan:** Meskipun terdapat permasalahan namun program bantuan ini cukup berdampak dalam penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Tabanan.

**Kata kunci:** Implementasi, Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kemiskinan

## I. PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Penduduk pada suatu wilayah maupun negara pada dasarnya ialah suatu modal bagi pembangunan, tetapi ada kalanya juga mampu menjadi sumber beban bagi pembangunan suatu negara. Pernyataan diatas didasarkan pada realitas bahwa jumlah penduduk yang besar yang diimbangi kualitas yang baik dari sisi kesehatan, pendidikan, ataupun kemampuan untuk beradaptasi terhadap perkembangan teknologi yang ada, melalui hal tersebut masyarakat akan mampu untuk berkarya maupun berpartisipasi dalam berbagai rencana pembangunan sebagai agenda dari tata kelola pemerintahan, sehingga akan sangat mendukung proses pembangunan di suatu negara (Hutasoit ; 2017).

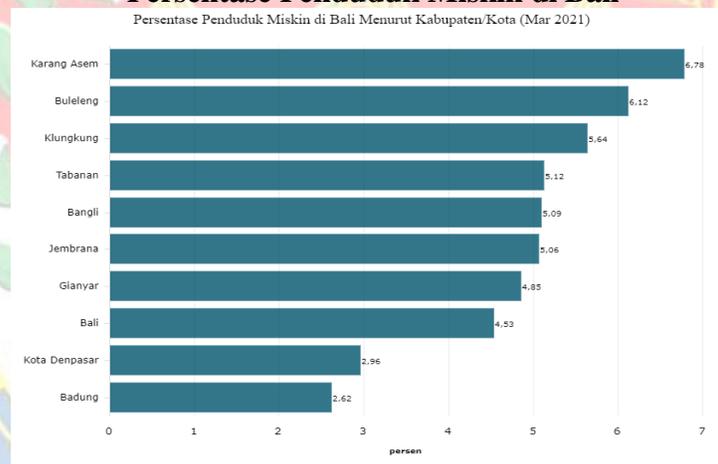
Pengembangan perekonomian pada suatu negara diterapkan dalam rangka memakmurkan masyarakat serta mengatasi beragam masalah pembangunan serta sosial ekonomi. Indonesia sebagai suatu negara berkembang dengan jumlah penduduk yang besar menyebabkan tidak menutup kemungkinan terjadinya berbagai permasalahan sosial yang dimana salah satunya adalah kemiskinan. Pendapatan masyarakat yang rendah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan paling mendasar, layaknya pangan, sandang, serta papan, mereka dapat dikatakan berada pada garis kemiskinan. Kemiskinan juga dapat menghalangi jutaan anak untuk mengakses pendidikan yang berkualitas, kurangnya akses pendidikan sangat mempengaruhi perkembangan perekonomian di suatu negara karena pendidikan ialah satu dari sekian banyak langkah yang mampu diterapkan dalam rangka memperbaiki kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan, seseorang mampu mempunyai pengetahuan lebih luas, sehingga berdampak pada tingkat keterampilan yang dapat digunakan dalam dunia kerja, sehingga akan mengurangi tingkat pengangguran dan memperbaiki perekonomian di Indonesia.

Kemiskinan termasuk permasalahan ekonomi yang sangat sulit dipecahkan, baik pada tingkat pusat maupun tingkat daerah. Kemiskinan sudah menjadi permasalahan sangat kompleks. Hal ini menyebabkan perlu adanya strategi pada proses pembuatan kebijakan yang tepat serta berkesinambungan agar permasalahan ini mampu diatasi.. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa pemerintah pusat memberikan kewenangan tersendiri pada pemerintah daerah untuk mengatasi kemiskinan yang terjadi di beberapa provinsi di Indonesia dengan jumlah masyarakat miskin yang cukup tinggi, dengan pemerintah pusat sebagai

memberi kebijakan untuk penanggulangan rakyat miskin yang kemudian dalam pelaksanaannya diserahkan kepada masyarakat daerah.

Provinsi Bali merupakan salah satu bagian wilayah Indonesia, yang lokasinya di sebelah timur Pulau Jawa, sebelah barat Pulau Lombok, dan termasuk beberapa pulau kecil di sekitarnya. Selain dikenal sebagai daerah yang kental akan budaya, Pulau Bali juga terkenal dengan salah satu destinasi wisata terbaik di Indonesia. Namun di balik majunya industri pariwisata, Pulau Bali juga dihadapkan dengan tingginya angka kemiskinan penduduk yang setiap tahunnya mengalami peningkatan dan harus segera dituntaskan. Sesuai dengan tujuan negara Indonesia yakni memajukan kesejahteraan umum sesuai yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4, dimana kemiskinan menjadi salah satu tantangan bagi bangsa Indonesia dalam mewujudkan tujuan negara. Berhubungan dengan masalah kemiskinan di Provinsi Bali, Kabupaten Tabanan ialah salah satu Kabupaten dengan tingkat kemiskinan cukup tinggi. Kabupaten Tabanan ialah salah satu kabupaten dari beberapa kabupaten/kota yang ada di Provinsi Bali. Kabupaten Tabanan berada di bagian Selatan Pulau Bali, bersamaan batasnya dengan Kabupaten Badung di sebelah timur, Kabupaten Buleleng di sebelah utara, Samudera Indonesia di sebelah selatan serta Kabupaten Jembrana di sebelah barat. Kabupaten Tabanan menjadi salah satu kabupaten dengan penduduk miskin yang cukup banyak ke-4 setelah Kabupaten Klungkung seperti yang terdapat dalam gambar 1.

**Gambar 1.**  
**Persentase Penduduk Miskin di Bali**



Sumber: Databoks, 2021

Dalam grafik tersebut dapat diketahui bahwa Kabupaten Tabanan berada pada posisi ke-4 dengan penduduk termiskin setelah Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng, dan Kabupaten Klungkung dengan jumlah presentase sebesar 5,12% dan tentunya persentase tersebut juga berpotensi meningkat apabila permasalahan kemiskinan di Kabupaten Tabanan tidak segera diselesaikan. Angka kemiskinan di Kabupaten Tabanan sempat mengalami penurunan, akan tetapi di tahun 2021 terakhir Kabupaten Tabanan justru mengalami peningkatan kemiskinan akibat dampak adanya Pandemi Covid-19 yang berkepanjangan. Sehingga Pemerintah Kabupaten Tabanan harus segera bergerak cepat dengan mengoptimalkan suatu program untuk mengatasi permasalahan yang ada. Adapun presentasi penduduk miskin di Kabupaten Tabanan beberapa tahun terakhir yakni:

**Tabel 1.**  
**Data Kemiskinan Kabupaten Tabanan**

Tahun	Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)	Presentase
2015	24,05	5,52%
2016	21,90	5,00%
2017	21,66	4,92%
2018	19,77	4,46%
2019	18,74	4,21%
2020	19,11	4,27%
2021	23,11	5,15%

Sumber: BPS Kabupaten Tabanan 2022

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa presentase kemiskinan tertinggi Kabupaten Tabanan pada tahun 2015 dengan presentasi 5,52% dan terendah pada tahun 2019 dengan presentase 4,21%. Dari keseluruhan data dapat di simpulkan bahwa presentasi kemiskinan di Kabupaten Tabanan sudah menurun secara signifikan pada setiap tahunnya. Untuk lebih mengoptimalkan persentase kemiskinan di Kabupaten Tabanan, sekiranya ada hal penting yang harus dilaksanakan yakni pendataan masyarakat yang kurang mampu. Pendataan masyarakat kurang mampu ini menjurus kepada pendataan masyarakat yang akan mendapatkan bantuan melalui program program bansos maupun pemberdayaan lainnya baik dari bantuan pusat, provinsi, daerah, maupun pihak ketiga.

**Tabel 2.**  
**Pelaporan Permasalahan BNPT Tahun 2020-2021**

Permasalahan	2020	2021	Total
Belum aktivasi	-	63	63
Mampu	-	1	1
Kartu Hilang	-	3	3
Belum punya kartu dan Buku tabungan	98	31	129
Kartu gagal gesek	-	1	1
Penerima BLT Dana Desa	1	-	1
Bantuan tidak keluar	4	-	4
Saldo 0	1	-	1
Kartu terblokir	1	-	1
Kartu rusak akibat kebakaran	1	-	1
Tertinggal informasi pengambilan	1	-	1
Pindah keluar daerah	1	-	1
Meninggal	1	-	1
Belum ada panggilan/baru menerima kartu	2	-	2
Jumlah	111	99	210

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Tabanan, diolah oleh peneliti (2022)

Dari tabel pelaporan permasalahan diatas, disimpulkan bahwa masih banyak terjadi permasalahan dalam penerimaan Bantuan Pangan Non Tunai. Terhitung paling banyak sejumlah 129

pelaporan masalah yakni karena belum mendapatkan kartu atau buku tabungan yang akan dipergunakan untuk mencairkan bansos yang akan diterima. Kedua yakni pelaporan terkait kartu belum di aktivasi oleh bank Himbara sebanyak 63, dengan demikian penerima juga tidak dapat menukarkan saldonya di E-Warong. Selain itu ada juga beberapa masalah lain seperti Bantuan tidak keluar, adanya seseorang yang dianggap mampu namun tetap mendapatkan bantuan, kerusakan maupun kehilangan kartu.

### **Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan sosial yang hingga saat ini masih susah untuk di tuntaskan serta membutuhkan kebijakan maupun program yang tepat untuk menanganinya. Program Bantuan Pangan Non Tunai merupakan salah satu program yang dicanangkan oleh Kementerian Sosial yang merupakan suatu usaha menekan angka kemiskinan di Indonesia dengan memberikan bantuan kepada penerima bantuan berupa bahan pangan. Program ini telah berjalan sejak 2017 dan telah berjalan di Kabupaten Tabanan hingga saat ini. Namun berdasarkan data yang ada di Lapangan, masih terdapat beberapa kesenjangan yang terjadi dalam pengimplementasian program Bantuan Pangan Non Tunai di Kabupaten Tabanan, dilihat dari banyaknya pelaporan masyarakat terkait keluhan keluhan yang ada dalam pelaksanaan program. Banyaknya pelaporan seperti kurang tepat sarasannya penerima bantuan, terlambatnya penerima bantuan menerima bantuan serta sulitnya penerima bantuan menukarkan bantuan yang akan diterimanya.

Adapun kesenjangan yang diambil pada penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai di Kabupaten Tabanan, apa yang menjadi masalah dalam pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai di Kabupaten Tabanan, serta bagaimana upaya pemerintah Kabupaten Tabanan dalam mengatasi masalah dalam pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai

### **Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang telah dilakukan terdahulu mengenai Program Bantuan Pangan Non Tunai memiliki manfaat bagi penulis sebagai acuan, masukan serta pertimbangan dalam proses penyusunan penelitian. Ika Surya Kharismawati (2018) dengan judul “Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Melalui E-Warung Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya”. Penelitian dengan metode kualitatif ini menunjukkan hasil bahwa ukuran serta tujuan dari kebijakan belum mampu dicapai maksimal sebab masih ada masalah di mesin EDC yang menyebabkan penghambatan penyaluran bantuan. Persamaan terletak pada pembahasan terkait Pengimplementasian Program Bantuan Pangan Non Tunai. Perbedaan terletak pada teori yang digunakan dimana penelitian sebelumnya menggunakan teori dari Van Metter dan Van Horn sedangkan peneliti menggunakan teori dari Mazmanian dan Sabtier, lokasi penelitian, fokus penelitian serta ruang lingkup penelitian.

Penelitian oleh Helvine Gultom (2020) “Analisis Pengaruh Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Minahasa Utara”. Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif. Hasil penelitian yakni Bantuan Pangan Non Tunai memiliki pengaruh positif serta signifikan pada kemiskinan Jika jumlah Bantuan Pangan Non Tunai naik maka tingkat kemiskinan juga naik begitupun sebaliknya Persamaan terletak pada pembahasan terkait Program Bantuan Pangan Non Tunai. Perbedaan terletak pada metode penelitian dimana penelitian sebelumnya menggunakan metode penelitian Kuantitatif, sedangkan peneliti menggunakan metode Kualitatif, teori, serta lokasi penelitian.

Penelitian dari Herlina Mega Yuliyanti (2021) “Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kota Sumenep”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian merujuk pada kelemahan program BPNT yakni proses memperbaiki serta menonaktifkan pemilik KPM yang meninggal dunia memerlukan waktu cukup lama. Kelebihan

program BPNT yakni mampu menghemat waktu, serta merupakan bantuan yang sangat bermanfaat. Persamaan terletak pada pembahasan terkait Program Bantuan Pangan Non Tunai serta metode penelitian yang digunakan. Perbedaan terletak pada lokasi penelitian, teori penelitian dimana penelitian sebelumnya menggunakan teori Efektivitas. Penelitian terdahulu lebih merujuk kepada hasil dari pelaksanaan program, sedangkan penelitian yang dilakukan sekarang lebih fokus kepada proses.

### **Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Tabanan.

### **Tujuan.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Tabanan, mendeskripsikan permasalahan yang ada dalam Implementasi Program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Tabanan, serta mengetahui dan menganalisis upaya pemerintah Kabupaten Tabanan mengatasi permasalahan dalam Implementasi Program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Tabanan.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian berada di Kabupaten Tabanan dengan teknik pemilihan informan secara Purposive sample. Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini juga menggunakan Triangulasi dalam menganalisis data. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang tidak menggunakan hitungan maupun statistik dalam memperoleh hasilnya. Penelitian ini menggunakan analisis data induktif dengan mempertimbangkan relevansi serta data yang didapatkan di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan metode Deskriptif. Menurut Sugiyono (2013:29) menjelaskan metode deskriptif merupakan metode yang digunakan dalam rangka memberi gambaran maupun analisis hasil penelitian namun tidak untuk pembuatan kesimpulan yang lebih luas.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Tabanan**

Program Bantuan Pangan Non Tunai yang dilaksanakan di Kabupaten Tabanan merupakan salah satu program Kementerian Sosial yang diberikan kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang bertujuan mengurangi beban pengeluaran masyarakat terutama di bidang pangan, serta memberikan gizi tambahan kepada masyarakat secara tepat sasaran serta tepat waktu di setiap bulannya melalui mekanisme uang elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau disebut E-Warong yang bekerjasama dengan bank penyalur. Bantuan Pangan Non Tunai ini telah berjalan dari tahun 2018, dimana BPNT ini merupakan transformasi dari program sebelumnya yang bernama "Rastra" atau "Beras Sejahtera". Adapun tujuan transformasi dari program sebelumnya tiada lain agar masyarakat dapat memilih sendiri kebutuhan pangan selain beras yang dibutuhkan seperti telur maupun daging. Proses pendataan penduduk yang mendapat program BPNT ini yaitu melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dimana masyarakat yang mendapatkan bantuan ini merupakan masyarakat yang memang termasuk golongan kurang mampu serta memenuhi syarat yang telah ditentukan, yang dilihat langsung dari rumah ke rumah oleh aparat desa didampingi oleh pilar pilar sosial di desa baik itu petugas PKH (Program Keluarga Harapan) atau TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan), setelah itu untuk memastikan kembali apakah yg bersangkutan benar benar layak mendapat bantuan sosial maka dilakukan musyawarah kelurahan/musyawarah desa yang hasilnya akan dimasukkan kedalam aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – *Next Generation*).

Dalam pelaksanaan proses penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai ini, pemerintah Kabupaten Tabanan khususnya Dinas Sosial bekerjasama dengan pihak ketiga, dimana pihak ketiga tersebut merupakan bank penyalur dana bantuan serta pedagang terpilih yang menyediakan sembako atau disebut dengan E-Waroeng. Teknis penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Kabupaten Tabanan adalah Keluarga Penerima Manfaat akan diberikan kartu rekening yang setiap bulannya akan diisi saldo/dana oleh pemerintah. Saldo tersebut hanya dapat ditukarkan dengan sembako di pihak ketiga/E-Waroeng dan tidak dapat ditukarkan dengan uang tunai ataupun kebutuhan lain selain sembako.

Kabupaten Tabanan bekerjasama dengan 12 E-Waroeng dan 30 Agen yang tersebar di masing masing kecamatan, dimana E-Waroeng di masing masing kecamatan di Kabupaten Tabanan telah bekerjasama dengan pihak penyalur/ bank himbara yang telah disepakati oleh Kementerian Sosial. Pada penjelasan sebelumnya peneliti telah menjelaskan bahwa masing masing KPM akan mendapatkan kartu rekening, yang saldonya akan diisi ulang oleh pemerintah setiap bulannya dan saldo tersebut hanya dapat di tukarkan dengan sembako di E-Waroeng. Keluarga Penerima Manfaat(KPM) akan dibukakan rekening kolektif yang berbentuk kartu elektronik/Kartu Kesejahteraan Sosial untuk transaksi di E-Waroeng/Agen BRI-Link. Disebut E-Waroeng dikarenakan transaksi yang dilakukan tidak menggunakan uang tunai melainkan menggunakan metode transfer. Keluarga Penerima Manfaat atau biasa disingkat KPM merupakan keluarga yang ditetapkan sebagai penerima manfaat Program BPNT. KPM merupakan keluarga yang tergolong miskin atau kurang mampu di Kabupaten Tabanan, yang kemudian didata masing masing tiap desa untuk diberikan bantuan sosial. Proses pendataan KPM program BPNT yaitu dari lurah atau kepala desa yang mengusulkan warga yang dianggap tidak mampu serta membutuhkan di wilayahnya untuk masuk DTKS agar dapat menerima serta mengakses bantuan. Apabila ada warga yang merasa kurang mampu dan memerlukan akses bansos baik telah terdaftar dalam DTKS maupun belum terdaftar dalam DTKS yang belum pernah diusulkan untuk mendapatkan bansos dapat mengusulkan diri kepada lingkup terkecil terlebih dahulu (Kepala Desa/Lurah) agar dapat diusulkan sebagai KPM Bansos. Dan apabila usulan tersebut telah diajukan dari kelurahan/desa, maka selanjutnya akan ada kunjungan ke rumah oleh pilar pilar sosial dalam rangka verifikasi kelayakan kriteria keluarga tersebut sesuai dengan kriteria yang telah di tetapkan oleh Kementerian Sosial. DTKS tersebut selanjutnya di input oleh Dinas Sosial ke Kementerian Sosial melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation (SIKS-NG) , dimana SIKS-NG ini akan menjadi penentu kuota KPM.

Responden merupakan seseorang yang mampu menjawab pertanyaan yang diajukan baik secara tertulis, lisan maupun melalui kuisioner. Adapun responden dalam penelitian ini yaitu peneliti bertanya melalui wawancara secara langsung kepada responden terkait pekerjaan serta tingkat penghasilan responden guna mendapatkan informasi yang relevan terkait penelitian yang dilakukan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 50 sample KPM yang ada di Kabupaten Tabanan. Berikut karakteristik yang digunakan peneliti:

**Tabel 3.**  
**Karakteristik Responden**

Karakteristik responden	Kategori	Jumlah
<b>Pekerjaan</b>	Kuli Bangunan	11
	Petani	7
	Nelayan	9
	Buruh Cuci	4
	Tukang parkir	3
	Supir angkot	4
	Buruh angkut barang	6
	Pedagang	4
	Seniman	2
	Total	50KK
<b>Penghasilan</b>	Rp.100.000-Rp.500.000	18
	Rp.500.000-Rp.1000.000	26
	Rp.1.000.000-Rp.1.500.000	6
	Rp.1.500.000-Rp.2.000.000	-

Sumber: Diolah oleh peneliti

Menurut Badan Pusat Statistik (bps.go.id) , dalam menggolongkan gaji tiap keluarga dapat dibagi sebagai berikut:

- Tinggi : (Rp.5.000.000 atau lebih)
- Sedang : (Rp.1.000.000 - Rp.5.000.000)
- Rendah : (Rp.500.000 – Rp.1.000.000)

Kesimpulan dari karakteristik responden menurut pekerjaan serta penghasilan, dari 50KK responden tidak ada yang berpenghasilan tinggi, pada kenyataannya dari 50 responden 32 diantaranya berpenghasilan sedang serta 18 berpenghasilan rendah. Keberhasilan suatu program dapat diukur dari tingkat kepuasan penerima manfaat dari program tersebut. Untuk melihat tingkat kepuasan KPM terhadap program Bantuan Pangan Non Tunai di Kabupaten Tabanan maka peneliti melakukan kegiatan pengukuran tingkat kepuasan melalui pengisian kuisioner. Kuisioner merupakan suatu metode survey yang berisikan daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden baik secara langsung maupun tidak langsung, kemudian kumpulan jawaban dari pertanyaan tersebut akan digunakan sebagai data atau jawaban atas permasalahan yang diteliti. Dalam pencarian tingkat kepuasan KPM terhadap program BPNT, peneliti memberikan 7 butir pertanyaan yang akan diberikan kepada 50 KPM dengan pendapatan serta pekerjaan yang berbeda beda. Berikut adalah hasil kuisioner tingkat kepuasan KPM terhadap program BPNT di Kabupaten Tabanan:

**Tabel 4.**  
**Hasil Kuesioner**

No	Item Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS	Total
1	Program Bantuan Pangan Non Tunai membantu mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat.	8	16	13	13	-	50
2	Program Bantuan Pangan Non Tunai berjalan secara berkelanjutan di Kabupaten Tabanan	7	24	17	2	-	50
3	Pendataan penerima bantuan sosial telah terlaksana secara menyeluruh	3	18	14	12	3	50
4	Bantuan pangan yang diterima KPM layak untuk dikonsumsi	12	28	10	-	-	50
5	Bantuan pangan yang diterima KPM sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan	10	19	13	8	-	50
6	Harga bantuan pangan yang diterima KPM sesuai dengan standar kebutuhan	16	17	17	-	-	50
7	Apakah KPM puas dengan adanya program BPNT ini?	11	20	11	8	-	50

Sumber: diolah oleh peneliti

Berdasarkan hasil kuisisioner diatas, dapat dilihat dari pernyataan nomor 1 dari 50 responden terdapat 24 responden yang setuju dan 13 responden yang tidak setuju, jadi dapat disimpulkan bahwa Program BPNT di Kabupaten Tabanan cukup mampu membantu mengurangi beban pengeluaran KPM. Selanjutnya, pada pernyataan nomor 2 dari 50 responden, 31 responden menyatakan setuju dan 2 responden menyatakan tidak setuju, maka dapat disimpulkan bahwa Program BPNT di Kabupaten Tabanan dapat dikatakan sudah berjalan dengan cukup konsisten. Kemudian pada pernyataan nomor 3 dari 50 responden, 21 responden menyatakan setuju sedangkan 15 responden menyatakan tidak setuju maka dapat disimpulkan bahwa program BPNT di Kabupaten Tabanan berjalan cukup menyeluruh. Pada pernyataan nomor 4 dari 50 responden, 40 responden menyatakan bahwa setuju terkait bantuan yang diterima layak untuk dikonsumsi, begitu juga dengan pernyataan nomor 6 dari 50 responden 33 menyatakan setuju terkait harga bantuan pangan yang diterima KPM sesuai dengan kebutuhan, dari pernyataan nomor 4 dan 6 tidak ada responden yang menjawab tidak setuju, artinya BPNT di Kabupaten Tabanan layak untuk dikonsumsi serta harga yang bantuan pangan yang diterima sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya pada pernyataan nomor 5 dari 50 responden, 29 diantaranya menyatakan setuju dan 8 responden menyatakan tidak setuju, jadi dapat disimpulkan bahwa BPNT di Kabupaten Tabanan cukup sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan KPM. Kemudian di pernyataan yang terakhir, nomor 7 dari 50 responden menyatakan 31 responden menyatakan setuju, sedangkan 8 responden menyatakan tidak setuju, artinya sebagian besar KPM merasa cukup puas terhadap program BPNT di Kabupaten Tabanan.

Dari 7 pernyataan kuisisioner yang telah mendapat respon oleh KPM, peneliti dapat menyimpulkan bahwa program Bantuan Pangan Non Tunai di Kabupaten Tabanan secara umum sudah berjalan dengan baik dan mendapatkan respon positif dari KPM, meskipun masih terdapat kekurangan yang dilihat dari respon KPM.

### **Partisipasi dalam Pelaksanaan**

Program Bantuan Pangan Non Tunai merupakan suatu program yang merupakan transformasi dari program Beras Miskin, program BPNT di Kabupaten Tabanan ini telah ada sejak tahun 2018 dan masih berjalan hingga tahun 2023 ini, adanya program ini dianggap mampu membantu masyarakat

kurang mampu sehingga masyarakat mampu melihat bentuk dari kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Penyaluran bantuan pangan non tunai yang berupa beras dan telur bagi keluarga yang miskin atau kurang mampu ditujukan guna mampu mengurangi pengeluaran masyarakat di bagian pangan serta mampu memberikan kebutuhan pangan serta gizi seimbang kepada keluarga penerima manfaat. Pelaksanaan program BPNT ini juga merupakan suatu cara meningkatkan pertumbuhan ekonomi terutama bagi usaha kecil di bagian perdagangan dengan memanfaatkan usaha kecil pedagang sebagai tempat penyaluran bantuan atau sering disebut dengan E-Waroeng. Suksesnya sebuah program harus dibantu oleh beberapa indikator, fakta yang ada di lapangan, suksesnya program BPNT ini didukung oleh beberapa indikator, diantaranya:

- a. Tepat sasaran, artinya program BPNT hanya diberikan kepada keluarga miskin atau kurang mampu yang telah terdaftar sebagai KPM serta program ini tersalurkan secara menyeluruh. Hasil 50 perwakilan KPM yang telah peneliti berikan kuisisioner dengan karakteristik mata pencaharian serta pekerjaan, dapat dilihat bahwa sebagian besar berpenghasilan rendah serta belum mampu untuk mencukupi kebutuhan pangannya.
- b. Tepat waktu, yang diartikan tepat waktu yaitu bantuan yang diberikan oleh pemerintah tersalurkan sesuai dengan waktu serta jadwal yang telah di tentukan. Fakta yang peneliti dapatkan di lapangan yaitu bahwa dalam proses penyaluran dana ke rekening KPM, tidak secara konsisten ataupun tepat pada waktu yang ditentukan.
- c. Tepat jumlah, dengan jumlah bantuan yang masuk kedalam rekening KPM sebesar RP 200.000 yang dapat ditukarkan dengan beras serta telur, program BPNT ini diharapkan mampu memberikan gizi tambahan bagi KPM serta mengurangi pengeluaran KPM terutama di bidang pangan.
- d. Tepat Harga, dalam penyaluran bantuan ini masyarakat atau KPM tidak ada dipungut biaya apapun, masyarakat yang telah masuk dalam syarat penerima bantuan biasanya langsung di data atau dapat mengajukan diri kepada kepala desa/lurah maupun petugas PKH yang ada di daerahnya tanpa perlu mengeluarkan uang/biaya apapun. Untuk KPM yang telah mendapatkan kartu rekening serta sudah berisi saldo dapat di tukarkan ke E-Waroeng, dimana harga telur dan beras yang tersedia dan akan diberikan kepada masyarakat telah ditentukan harganya oleh Dinas Ketahanan Pangan bahwa harga yang diberikan untuk bantuan sosial harus dibawah harga standar dan dengan kualitas yang premium.
- e. Tepat Administrasi, penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Tabanan sudah memenuhi administrasi, dilihat dari penerima BPNT yaitu KPM yang sudah mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang akan diisi ulang saldo ditiap bulannya, berarti masyarakat sudah melewati tahap administrasi. Selain itu, masyarakat juga telah diberikan pemahaman lewat kegiatan sosialisasi di masing masing desa terkait program bantuan sosial yang ada. Dalam proses pengambilan bantuan tidak ada dipungut biaya apapun, penerima bantuan hanya perlu datang ke E-Waroeng serta memberikan KKS untuk dapat melakukan transaksi.

Data KPM yang sudah benar selanjutnya diserahkan ke Dinas Sosial Kabupaten Tabanan untuk di input kedalam aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation), dimana aplikasi ini sudah terhubung langsung dengan Kementerian Sosial. Jumlah data yang diminta telah di tetapkan oleh Kementrian Sosial, apabila jumlah data yang di input kurang dari jumlah kuota pada kabupaten/kota, maka daerah diminta untuk mengusulkan calon KPM yang telah memenuhi pagu KPM dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), dan sebaliknya apabila ada data yang diinput melebihi dari pagu KPM pada setiap kabupaten maka Kementerian Sosial akan melakukan penyesuaian jumlah calon KPM terhadap pagu yang sudah di tetapkan.

Mengurangi terjadinya masalah dalam memasukkan data KPM, Dinas Sosial Kabupaten Tabanan melaksanakan pengecekan secara langsung ke rumah rumah penduduk yang terdata sebagai

penerima manfaat, kemudian apabila terjadi perubahan data pada KPM, maka akan dilakukan musyawarah kelurahan / musyawarah desa. Selain itu apabila ada masyarakat desa yang merasa dirinya tidak mampu serta berhak mendapatkan bantuan ini maka dapat langsung melaporkan diri ke pihak Desa/Kelurahan ataupun langsung ke Dinas Sosial Kabupaten Tabanan untuk selanjutnya diperiksa terkait kelayakan mendapatkan bantuan.

Hubungan kerja sama pemerintah dengan pihak ketiga yaitu pihak bank sebagai pihak penyalur dana bantuan. Pihak Pemerintah Kabupaten Tabanan bekerjasama dengan Bank Himbara sebagai bank penyalur, adapun Bank Himbara yaitu Bank Himpunan Milik Negara, adapun 4 bank yang termasuk dalam Himbara yaitu Bank BRI, Bank Mandiri serta Bank BTN. Bank akan membukakan rekening secara kolektif untuk semua KPM, kemudian KPM akan mendapatkan kartu elektronik yang dicetak dalam bentuk KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) yang dilengkapi nama peserta dan nomor peserta KPM. Kemudian pihak bank akan melaporkan kepada Kementerian Sosial terkait berapa KPM yang telah berhasil dibukakan rekening secara kolektif serta berapa KPM yang tidak dapat dibukakan rekening beserta alasannya. Sampai saat ini masih saja ada permasalahan dalam pembukaan rekening untuk KPM di Kabupaten Tabanan.

Setelah pembukaan rekening pada bank, maka pemerintah daerah serta pihak bank akan mengidentifikasi agen bank ataupun pedagang yang akan bekerjasama sebagai penyalur bantuan atau menjadi E-Warong penyalur Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). E-Warong merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah yang telah bekerjasama dengan pihak bank yang memiliki tujuan mempermudah penyaluran bantuan sosial khususnya bantuan pangan non tunai bagi masyarakat yang telah terdaftar, serta mengurangi penyimpangan yang terjadi pada penyaluran bantuan, memudahkan dalam melaksanakan kontrol pada penyaluran bantuan serta agar bantuan dapat tepat sasaran, tepat waktu serta tepat jumlah.

Setelah penetapan E-Warong, bank penyalur akan menertibkan dokumen perjanjian kerja sama yang berisi tentang hak serta kewajiban masing masing pihak. Kemudian Tim Tenaga Kesejahteraan Sosial Kabupaten Tabanan melakukan pengecekan guna memastikan kecukupan E-Warong untuk menghindari antrian, kurangnya barang, serta permainan harga barang. Selain itu juga, Tim Tenaga Kesejahteraan Sosial memastikan tiap tiap E-Warong membuat log BPNT pada agen / spanduk yang harus ditempel di masing masing E-Warong dan juga mensosialisasikan kepada masyarakat sekitar terkait keberadaan E-Warong agar KPM mengetahui tempat menukarkan bantuan terdekat. Sosialisasi dilaksanakan oleh masing masing Tim Tenaga Kesejahteraan Sosial atau Pendamping Program Keluarga Harapan yang didampingi oleh perangkat Desa/Kelurahan, Bank Penyalur serta Keluarga Penerima Manfaat. Sosialisasi dilaksanakan di masing masing Kantor Desa, dengan isi sosialisasi berupa kebijakan serta tujuan program, mekanisme program, prinsip pelaksanaan program, tata cara penggunaan KKS, serta pelaporan terkait kendala pada saat pelaksanaan program. Sosialisasi biasanya dilaksanakan di kantor Desa/Kelurahan, dilakukan pada Tahun Anggaran Baru atau ketika adanya surat keputusan baru dari Dinas Sosial ataupun Kementerian Sosial.

Dana bantuan akan ditransfer kepada rekening KPM paling lambat selama 30 hari kerja setelah dana tersebut di transfer dari Kas Negara ke Rekening Kementerian Sosial yang ada pada bank penyalur, bantuan ini biasanya disalurkan kepada KPM pada awal bulan dengan nominal yang diterima masing masing KPM sebesar Rp. 200.000/bulan. Proses penyaluran ini berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan oleh Menteri Sosial terkait belanja bansos. Fakta dilapangan yang peneliti temukan bahwa dalam penyalurannya KPM banyak yang mengeluh terkait terlambat masuknya bantuan ke rekening KPM bahkan hampir 1bulan tidak masuk dan dikirimkan pada bulan selanjutnya, seperti yang dikatakan salah satu informan KPM di daerah Kediri yaitu Bapak Ketut Wijana serta ditegaskan lagi oleh Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Tabanan Bapak I Putu Ariana

yang mengatakan bahwa bantuan sering datang tidak tepat waktu bahkan bisa 1 bulan tidak masuk sama sekali dan di kirimkan bulan depannya.

Proses pemanfaatan BPNT dimana KPM datang ke E-Waroeng yang telah disediakan serta ditetapkan oleh pihak pemerintah serta bank penyalur dengan membawa Kartu rekening atau Kartu Keluarga Sejahtera, kemudian dilakukan pengecekan saldo dengan mesin EDC, saldo yang ada pada rekening KPM tersebut hanya dapat ditukarkan dengan Beras dan Telor. Setelah melakukan transaksi, KPM akan menerima barang pangan yang diterima serta bukti transaksi. Dalam penukaran saldo yang ada di kartu rekening, KPM dapat memilih menukarkan saldonya di E-Waroeng mana saja, dengan cara pengambilan harus langsung menuju E-Waroeng, serta barang harus diambil langsung tidak boleh dipaketkan. Untuk pelaksanaan transaksi dapat dilakukan kapan saja selama E-Waroeng masih buka serta persediaan di E-Warong masih ada. KPM juga berhak melaporkan keluhan atau masalah terkait penukaran saldo kepada perangkat desa/kelurahan untuk dilaporkan kepada Dinas Sosial Kabupaten Tabanan.

Masyarakat yang sejahtera dapat dilihat dari standar hidupnya yang semakin meningkat. Salah satu tolak ukur masyarakat sejahtera yaitu terpenuhinya segala kebutuhan pokok seperti sandang pangan dan papan. Program Bantuan Pangan Non Tunai merupakan salah satu program yang merupakan suatu bantuan sosial yang disalurkan dalam bentuk pangan atau non tunai yang diharapkan mampu mengurangi pengeluaran masyarakat kurang mampu khususnya di bidang pangan. Program ini telah terlaksana di Kabupaten Tabanan sejak tahun 2018 yang hingga kini masih berjalan serta memberikan manfaat kepada masyarakat kurang mampu yang menerima program ini. Berikut peneliti lampirkan data penduduk penerima BPNT di Kabupaten Tabanan:

**Tabel 6.**  
**Jumlah Persentase Penerima BPNT di Kabupaten Tabanan**

Tahun	DTKS	BPNT	Persentase
2020	122.755	36.007	29,33%
2021	188.057	27.930	14,85%
2022	213.554	22.733	10,65%

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Tabanan diolah oleh Peneliti

Dilihat dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) setiap tahunnya mengalami peningkatan, peningkatan ini disebabkan akibat pandemi Covid-19 sehingga merubah sendi sendi kehidupan masyarakat, yang semula bekerja menjadi pengangguran sehingga dalam kurun waktu yang cukup lama menyebabkan ekonomi keluarga tersebut menurun sehingga memerlukan uluran tangan pemerintah dalam hal ini mendapatkan program bantuan sosial dan pemberdayaan lainnya untuk menopang kehidupan keluarga. Adapun bantuan sosial lain yang tergolong dalam DTKS antara lain Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Kartu Indonesia Pintar. KPM yang telah terdata dalam DTKS tidak dapat terhapus dari sistem yang dibuat oleh Pusdatin Kemensos, meskipun masyarakat tersebut sudah dianggap mampu atau tidak mendapatkan bantuan lagi namun tetap terdata dalam DTKS itulah alasan mengapa DTKS tiap tahunnya selalu meningkat / tidak ada pengurangan. Selanjutnya dilihat dari jumlah penerima BPNT di Kabupaten Tabanan dimana semakin tahun semakin sedikit penerimanya, dan dilihat juga dari persentase nya yang tiap tahun semakin menurun, berarti tiap tahun penerima

bantuan semakin berkurang, maka dapat disimpulkan sebagian perekonomian masyarakat telah pulih dan sudah semakin sedikit masyarakat yang memerlukan BPNT tersebut.

### **Faktor kendala yang terjadi dalam Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kabupaten Tabanan**

Dalam pelaksanaan suatu kegiatan pasti terdapat kendala yang dihadapi, tidak terkecuali Kabupaten Tabanan, dimana hingga saat ini pada pelaksanaan Program BPNT di Kabupaten Tabanan masih sering ditemukan permasalahan berikut:

- 1) Masih adanya masyarakat miskin/kurang mampu yang belum terdata untuk mendapatkan BPNT di Kabupaten Tabanan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dan juga data terkait pelaporan dari masyarakat kepada Dinas Sosial Kabupaten Tabanan, diketahui bahwa masih banyak masyarakat miskin / kurang mampu yang belum terdata untuk mendapatkan bantuan.
- 2) Penyaluran Dana Bantuan yang belum konsisten. Hingga saat ini penyaluran dana BPNT belum ada tanggal yang pasti di setiap bulannya sehingga membuat KPM tidak dapat mengatur uang mereka dengan baik. Terkadang dana bantuan masuk ke rekening KPM pada awal bulan, namun tak jarang bantuan masuk dua kali lipat karena bulan sebelumnya bantuan tidak tersalurkan. Dana program bantuan pangan ini berasal dari Anggaran pemerintah pusat yang termasuk Dana Bantuan Sosial, dikirim langsung ke rekening Dinas Sosial Kabupaten Tabanan melalui pihak ketiga (Bank Himbara). Untuk itu peneliti tidak dapat mengetahui apa yang menyebabkan bantuan ini tidak konsisten karena dana bantuan datang dari pusat.
- 3) Kurang maksimalnya pemberian layanan dari E-Warong kepada Keluarga Penerima Manfaat. Dalam pelaksanaan penyaluran BPNT, pemerintah bekerjasama dengan E-Warong sebagai agen penyalur/ tempat menukarkan bantuan sosial. Permasalahan yang sering terjadi di beberapa E-Warong Kabupaten Tabanan yaitu kurangnya stok barang pokok yaitu beras dan telur yang membuat KPM harus menunggu barang tersebut ada terlebih dahulu agar bisa menukarkan bantuan. Ini dikarenakan penjualan/penukaran beras serta telur yang banyak sehingga stok pada E-Warong habis. Selain itu juga ada beberapa E-Warong yang terkadang mesin EDC nya bermasalah yang menghambat penukaran bantuan sosial. Hasil wawancara bersama Ibu Iluh KPM di daerah Marga.

### **Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Adanya pelaporan terkait keluhan masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Tabanan khususnya Dinas Sosial dalam Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai menunjang Pemerintah Kabupaten Tabanan untuk melakukan upaya upaya dalam rangka memperbaiki serta mengatasi masalah masalah yang ada. Adapun beberapa upaya yang dilakukan:

- 1) Melakukan peninjauan ke Rumah Keluarga Penerima Manfaat guna memastikan kelayakan penerima bantuan. Seperti yang telah peneliti jelaskan, dalam proses mendata atau pendataan keluarga penerima manfaat, setelah data yang diterima serta diinput dari tiap tiap Desa, maka akan dilakukan peninjauan langsung kondisi keluarga penerima manfaat tersebut oleh tim koordinasi BPNT atau pendamping PKH. Tim dari dinas sosial akan terjun langsung kelapangan melihat kondisi nyata yang ada di lapangan melihat apakah keluarga tersebut berhak mendapatkan bantuan atau tidak.
- 2) Memberikan label atau tanda pada rumah warga yang termasuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Salah satu upaya Dinas Sosial Kabupaten Tabanan agar bantuan yang disalurkan kepada masyarakat dapat tepat sasaran, serta mengurangi terjadinya tumpang tindih dalam

pendataan masyarakat yang termasuk dalam Keluarga Penerima Manfaat yaitu dengan memberikan label penerima bantuan pada rumah KPM. Selain itu, pemberian tanda penerima bantuan juga diharapkan memberikan rasa malu kepada keluarga yang mendaftarkan diri sebagai penerima bantuan namun kenyataannya keluarga tersebut tergolong mampu atau berkecukupan. Label ataupun Tanda yang diberikan serta ditempelkan di depan rumah KPM yaitu “Keluarga Tidak Mampu” serta bantuan yang diterima yaitu berupa BPNT maupun PKH. Dalam pemberian label serta tanda ini tidak ada mendapat penolakan bagi KPM.

- 3) Sinergitas antara Dinas Sosial Kabupaten Tabanan bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan Sinergitas ini dilakukan sebagai upaya pemutakhiran data, karena selama ini masih banyak terjadinya kesalahan dalam penginputan data seperti NIK yang diberikan oleh KPM tidak sesuai dengan data yang tercatat di Disdukcapil, selain itu juga agar pemberian bantuan dapat tepat sasaran karena bisa saja penerima bantuan sudah meninggal namun bantuan tetap saja dikirimkan. Sinergitas Dinas Sosial dengan Dinas Dukcapil juga dapat memberikan kemudahan serta lebih cepat memproses calon KPM yang bermasalah karena data data calon KPM tidak sesuai yang beresiko menghambat proses penerimaan bansos.
- 4) Melaksanakan peninjauan secara rutin ke E-Warong. Peninjauan secara rutin kepada E-Warong dilaksanakan sebulan sekali guna mengetahui terkait permasalahan yang ada maupun kendala yang dialami oleh pemilik E-Warong dalam proses penyaluran BPNT agar kendala yang ada dalam E-Warong terkait penyaluran BPNT dapat segera di atasi. Pelaksanaan peninjauan ini dilakukan setiap 1 bulan sekali oleh Pendamping Program Keluarga Harapan, dimana pengecekan ini merupakan salah satu kegiatan rutin bulanan guna mengurangi kendala yang terjadi dalam E-Warong, dan juga memberikan kenyamanan agen pemilik E-Warong terkait kerja sama penyaluran BPNT.

#### IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kabupaten Tabanan yang telah berjalan cukup baik sejak tahun 2017. Meskipun dikatakan sudah cukup baik, namun kenyataannya masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan program ini seperti sarana yang kurang memadai, masih adanya masalah teknis dalam pelaksanaan program, serta upaya pemerintah untuk mengatasi masalah yang ada masih belum optimal. Meskipun terdapat permasalahan namun program bantuan ini cukup berdampak dalam penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Tabanan.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai untuk mengurangi tingkat kemiskinan.

#### V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tabanan beserta jajarannya karena telah membantu peneliti dalam proses penelitian ini.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- A. Muri Yusuf. 2014. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan". Jakarta: prenadamedia group.
- Abdul Wahab, Solichin. 2006. Analisis Kebijakan ; Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, S. 2013. Prosedur Penelitian - Suatu Pendekatan Praktik. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Basrowi dan Suwandi. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Rineka Cipta. Hutasoit, Imelda. 2017 Pengantar Ilmu Kependudukan. In: Pengantar Ilmu Kependudukan. Bandung: Alfabeta
- Indriantoro, Nur., dan Supomo, Bambang. (2013). Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen. Yogyakarta: BPFE.
- Moleong, Lexi J. 2014. Metodologi Penelitian kualitatif. Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- Maharani, Puan. 2017. Pedoman Bantuan Pangan Non Tunai. Buku Pedoman;1.
- Noor, Juliansyah, 2016. Metodologi Penelitian. Jakarta: Kencana Prenada Media. Group. Panjika 2000. Alfabeta.
- Sinambela, Poltak. 2006. Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono 2014. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2017. Metode penelitian dan Pengembangan. Bandung: Alfabeta
- Suharto, Edi (2009), Membangun masyarakat memberdayakan rakyat: kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial & pekerjaan sosial, Bandung: PT Refika Aditama.
- Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS
- Wiratna, Sujarweni. 2014. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Depdagri, LAN RI. 2007. Modul Pelayanan Publik. halaman 13.
- Gultom, H., Kindangen, P., & Kawung, G. M. V. (2020). Analisis Pengaruh Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) DAN Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara. Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah, 21(01), 39-53.
- Rubiyannah., Maria Magdalena M., dan Leonardo Budi H, (2016), "Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Dalam Penanggulangan Kemiskinan", Journal of Management, Vol.2 No.2 halaman 3.
- Surya Kharismawati, I., & Rosdiana, W. (2018). Implementasi Bantuan Pangan Non-Tunai (Bpnt) Melalui E-Warung Di Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya. Publika, 6(8).
- Yulianti, H. (2021). Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Di Kota Sumenep (Vol. 3, Issue 2).